



**THE INFLUENCE OF LOCAL TAXES, RETRIBUTIONS, AND RESULTS OF SEPARATE WEALTH MANAGEMENT ON REGENCY/CITY REGIONAL REVENUE IN CENTRAL JAVA PROVINCE
(Studies in Regencies/Cities in Central Java Province)**

Amy Wulandari¹, Arif Nugroho Rachman², Wahyu Widyaningrum³

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Info Article

Abstract

History Article:

Submitted : 02

November 2022

Revised : 12 Januari
2023

Accepted : 30 Januari
2023

Keywords :

*Regional Taxes,
Regional Levies,
Results of Separated
Wealth Management,
Regional Original
Income.*

This study aims to obtain empirical evidence regarding the analysis of the effect of Regional Taxes, Regional Levies, and Results of Wealth Management which are separated from Regional Original Income. The dependent variable in this study is Local Own Revenue, while the independent variables in this study are Regional Taxes, Regional Levies, and Separated Wealth Management Results. This study uses a quantitative method using secondary data taken from the 2019-2021 District/City Budget Realization Reports in Central Java Province. The sampling technique in this study used the documentation study method. The population for this study was 29 districts/cities in Central Java Province and 6 cities and obtained 105 LRA data, but only 30 LRA data could be processed. The research data processing method uses multiple regression analysis. The results of this study are that Regional Taxes, Regional Levies, and Separated Wealth Management Results have an effect on Regional Original Income.

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI, DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai analisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi. Populasi penelitian ini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota dan diperoleh data 105 data LRA, namun hanya 30 data LRA yang dapat diolah. Metode pengolahan data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pemulihan ekonomi Indonesia hingga tahun 2022.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah

✉ correspondence Address

2776-5865

Institutional address : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

(online)

E-mail: amywulandari19@gmail.com¹, arifnugroho.rachman@yahoo.co.id²,
wbylwahyu@gmail.com³

DOI:

[http://dx.doi.org/
10.35473/v1i1](http://dx.doi.org/10.35473/v1i1)

PENDAHULUAN

Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marteen, et al (2001) dan Robert (2002) yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang

paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Fenomena yang terjadi pada tahun 2020 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah turun Rp. 1,9 triliun karena pandemi *covid-19*. Penurunan pendapatan terbesar dari pajak kendaraan bermotor terutama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hal ini dapat membuktikan bahwa peran pajak yang paling besar kontribusinya terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, serta pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) menyatakan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah, secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah, secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Subianto dkk (2019) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis tidak didukung/ ditolak.

Teori

Stakeholder Theory

Teori yang melandasi penelitian ini adalah *stakeholder theory* atau teori pemangku kepentingan. Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “any group or individual who can

affect or be affected by the achievement of an organizations objective.” Bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Freeman (2010) menambahkan pemahaman teorinya bahwa *“The stakeholder concept was originally defined as those groups without whose support the organization would cease to exist.”* *The list of stakeholders originally included shareowners, employees, customers, suppliers, lenders and society.”*

Menurut Putro (2013) *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Menurut Ghozali dan Chairiri (2007) *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (*stakeholders*, kreditor, konsumen supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan atau organisasi tersebut.

Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 menjelaskan bahwa implikasi dari adanya *Stakeholder theory* dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Upaya dalam meningkatkan kemandirian daerah perlu dilakukan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah memiliki karakteristik salah satunya yaitu sifatnya yang memaksa, namun demikian masyarakat juga perlu memiliki kesadaran wajib pajak. Masyarakat pengguna layanan publik juga perlu memiliki kesadaran wajib retribusi. Menurut Mangkoesuebroto dalam Eka (2010) kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai hal pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sistem yang berlaku.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009). Pajak Daerah yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Darwin, 2010). Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada

Pendapatan Asli Daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009).

Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan

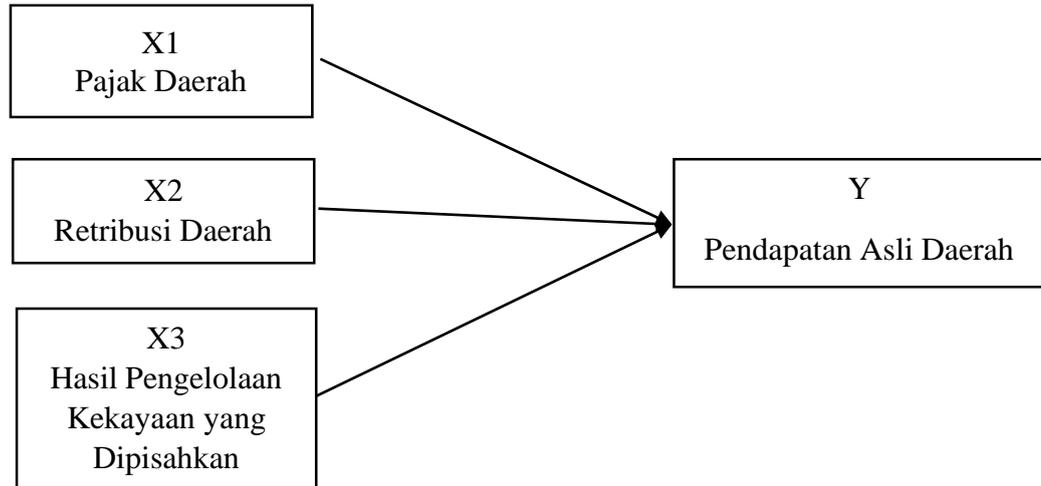
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

KERANGKA PIKIR

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kerangka pikir dalam penyusunan penelitian pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu sumber pendapatan asli dari suatu daerah berasal dari pajak daerahnya, dugaan yang dapat dimunculkan yaitu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, dimana memiliki arah hubungan yang positif atau berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah, dengan demikian dapat diambil dugaan sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara positif. Menurut Halim (2004), retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin

tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah. Dengan demikian, dapat diambil dugaan sementara bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh terhadap PAD secara positif.

H3: Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021. Jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data LRA tahun 2018-2020 meliputi data : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan Pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sampel adalah bagian dari sejumlah perusahaan yang diperkirakan dapat

mewakili karakteristik populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh sehingga Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda. Persamaan dari analisis berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah

X1 : Pajak Daerah

X2 : Retribusi Daerah

a : konstanta

b1,b2 : koefisien regresi

e : variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal.

Tabel 1 Uji Normalitas

	Jumlah	Ket
N	30	
Kol.-Smirnov Z	0,127	
Asymp.Sig.(2tailed)	0,200	Normal

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

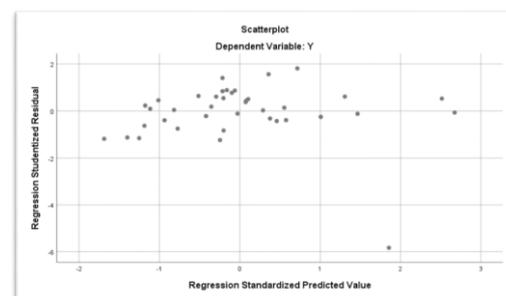
Berdasarkan tabel One-Sample

Kolmogrov-Smirnov Test diatas, nilai Asymp.Sig.(2-tailed) adalah 0,200 berarti distribusi data normal karena lebih dari 0,05.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya, apabila varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas



Apabila titik-titik dalam Scatterplot diatas terlihat menyebar, hal ini berarti berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau homokedastisitas, dan sebaliknya jika titik-titiknya terlihat mengelompok maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan Scatterplot diatas terlihat titik-titik menyebar sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas.

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

Variabel	Statistik Multikolinieritas	
	Tolerance	VIF
X1	0,184	1,947
X2	0,120	8,341
X3	0,307	3,257

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Pada tabel hasil uji multikolinieritas diperoleh hasil nilai VIF < 10 yaitu X1 1,947 ; X2 8,341 ; X3 3,257 dan nilai Tolerance ≥ 0,10 yaitu X1 0,184 ; X2 0,120 ; X3 0,307 maka dapat disimpulkan tidak terjadimultikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 3 Uji Autokorelasi

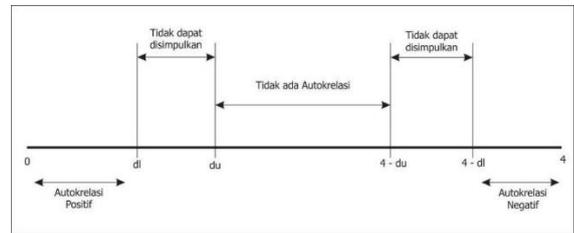
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,965	0,931	0,923	0,15282	2,058

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Jika diketahui $\alpha = 5\%$, $k = 3$ (jumlah variabel bebas = 3), $n = 30$ dan nilai Durbin-Watson(DW) yaitu 2,058 dan batas batas sebagai berikut :

$$dL = 1,2138 \text{ dan } 4 - dL = 2,7862$$

$$dU = 1,6498 \text{ dan } 4 - dU = 2,3502$$



Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Gambar 3 Kriteria Pengujian Durbin-Watson

Berdasarkan kriteria pengujian diatas, maka nilai DW sebesar 2,058 berada diantara dU dan 4-dU sehingga hasilnya tidak ada autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 4 Analisis Regresi Berganda

Model	B	t	Sig.
Constant	1,866	5,757	0,000
X1	1,145	12,081	0,000
X2	0,368	0,312	0,757
X3	3,691	2,096	0,056

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b X_1 + b X_2 + b X_3 + b X_4 + e$$

$$Y = 1,866 + 1,145 X_1 + 0,368 X_2 + 3,691 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Konstanta sebesar 1,866 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan X1, X2, X3 dan X4 maka nilai Y adalah sebesar 1,866.
- Koefisien regresi X1 atau Pajak Daerah sebesar 1,145 menyatakan bahwa setiap penambahan pajak daerah akan menambah jumlah pendapatan asli daerah.
- Koefisien regresi X2 atau Retribusi Daerah sebesar 0,368 menyatakan bahwa setiap penambahan retribusi daerah akan menambah jumlah pendapatan asli daerah.
- Koefisien regresi X3 atau Hasil

Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 3,691 menyatakan bahwa setiap penambahan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan akan menambah jumlah pendapatan asli daerah.

Uji F

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

Tabel 5 Uji F

	df	F	Sig.	Keterangan
Regression	3	648,168	0,000	Signifikan
Residual	29			
Total	29			

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Hasil Uji F dapat dilihat pada kolom Sig. yang menunjukkan signifikan tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan kriteria, jika nilai Sig. dibawah 0,05 berarti signifikan. Berdasarkan tabel diatas nilai Sig. sebesar 0,000 berarti variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat.

Uji t

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya.

Tabel 6 Uji t

Variabel	Sig.	Keterangan
X1	0,000	Signifikan
X2	0,757	Tidak Signifikan
X3	0,046	Signifikan

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Hasil analisis uji t ditunjukkan pada kolom Sig. dengan kriteria jika nilai Sig.

lebih kecil dari 0,05 berarti hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah signifikan. Berdasarkan kolom diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Nilai Sig pada X1 atau pajak daerah sebesar 0,000 yang berarti pajak daerah berpengaruh secara parsial atau individu terhadap pendapatan asli daerah.
- Nilai Sig pada X2 atau retribusi daerah sebesar 0,757 yang berarti retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.
- Nilai Sig pada X3 atau hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 0,0000 yang berarti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh secara parsial atau individu terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel korelasi

Tabel 7 Tabel Korelasi

		Y
Pearson Correlation	Y	1
	X1	0,992
	X2	0,923
	X3	0,848
Sig. (1-tailed)	Y	-
	X1	0,000
	X2	0,000
	X3	0,000

Berdasarkan tabel Korelasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Signifikansi hubungan masing-masing variabel bebas dan variabel terikat, yang ditunjukkan pada baris Sig.(1-tailed) dengan kriteria jika nilainya lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan.

Nilai Sig.(1-tailed) untuk X1 terhadap Y sebesar 0,000 menunjukkan bahwa hubungan keduanya adalah signifikan atau berarti karena nilainya lebih kecil dari 0,05.

Nilai Sig.(1-tailed) untuk X2 terhadap Y sebesar 0,000 menunjukkan bahwa hubungan keduanya adalah signifikan atau berarti karena nilainya lebih kecil dari 0,05.

Nilai Sig.(1-tailed) untuk X3 terhadap Y sebesar 0,000 menunjukkan bahwa hubungan keduanya adalah signifikan atau berarti karena nilainya lebih kecil dari 0,05.

2. Tingkat korelasi (r hitung) masing-masing variabel bebas dan variabel terikat dapat ditunjukkan pada baris Pearson Correlation sebagai berikut :

X1 dengan Y, nilai r hitung pada Pearson Correlation nilainya adalah 0,992 yang berarti korelasi antara X1 dengan Y adalah kuat.

X2 dengan Y, nilai r hitung pada Pearson Correlation nilainya adalah 0,923 yang berarti korelasi antara X2 dengan Y adalah kuat.

X3 dengan Y, nilai r hitung pada Pearson Correlation nilainya adalah 0,848 yang berarti korelasi antara X3 dengan Y adalah kuat.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah telah diterima. Hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai Sig. pada tabel Uji t. Nilai Sig. X1 sebesar 0,005 karena signifikansi kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa

hipotesis pertama (H_1) diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran pajak daerah, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila pajak daerah semakin menurun, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin menurun. Daerah memberikan sumbangan dari pajak daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Daerah mendapatkan kewenangan dalam menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Pembangunan ekonomi sendiri ditandai dengan kenaikan PAD yang diperoleh dimana pajak daerah menjadi salah satu komponen didalam PAD.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai Sig. pada tabel Uji t. Nilai Sig. X2 sebesar 0,000 karena signifikansi kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima, sehingga Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran retribusi daerah, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila retribusi daerah semakin menurun, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin menurun. Penerimaan retribusi terkait dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi, masyarakat yang menggunakan produk dan jasa yang disediakan pemerintah. Retribusi memberikan produk dan jasa secara langsung sehingga

masyarakat yang menggunakan produk dan jasa pemerintah diwajibkan membayar tarif yang telah ditentukan.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil dari uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai Sig. pada tabel Uji t. Nilai Sig. X_3 sebesar 0,000, karena signifikansi kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima, sehingga Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan semakin menurun, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin menurun.

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan uji SPSS dengan hasil nilai yang signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ serta mempunyai nilai F sebesar 0,000 berarti variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Sehingga, kesimpulan dari penelitian ini bahwa hipotesis diterima yang artinya variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan ruang lingkup penelitian

yang lebih luas. Penelitian mungkin bisa dilakukan di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Pulau Jawa atau bahkan seluruh Indonesia sehingga sampel yang diperoleh lebih banyak dan dianggap lebih mewakili seluruh populasi dan tidak hanya sampai 3 tahun dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Nurtantiono, S.E., M. . (2021). *ANALISIS REGRESI Kasus dan Analisis dengan SPSS*. BPKAD. (n.d.). *Mengenal Pendapatan Asli Daerah*. 2020.
- Kresnandra, A., & Erawati, N. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 544–560.
- Mulyono. (n.d.). *Analisis Uji Asumsi Klasik*. 2 Desember 2019.
- Pemerintah Kabupaten Boyolali. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran 2016*. 06 Agustus 2019.
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap the Effects of Local Tax and Local Retribution on. *Jurnal E- Proceeding of Management*, 2(1), 281–288.
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Si, S. (2017). *PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI*.
- Subianto, S., Indika, M., & Febriansa, H. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal*

Kajian Akuntansi Dan Auditing,
14(1), 1–8.
<https://doi.org/10.37301/jkaa.v14i1.4>
Yusuf. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi
Kasus pada Pemerintah Daerah Kota
Bandung periode 2011-2015). *JAF-
Journal of Accounting and Finance*,
1(01), 87–104.